Judul Resume : Hukum Tata Negara

Nama : Sumarni

Nim : 10200120237

Pembahasan :

A. Istilah hukum tata negara

- Belanda staatsrecht
- Inggris constitutionnal law
- Prancis droit constitutional
- Jerman verfassungsrecht

B. Pengertian hukum tata negara

- Menurut van der pot

Hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan beserta kewenangannya masing-masing hubungannya satu sama lain, serta hubungannya dengan individu warga negara dalam kegiatannya.

- Secara umum

Hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan dengan alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya.

C. Ruang lingkup kajian hukum tata negara

- Lembaga negara
- Kewenangan lembaga negara
- Bentuk dan sistem pemerintahan
- Batasan dan pemisahan cabang kekuasaan
- Konstitusi
- Prinsip dan hubungan antar lembaga negara
- Hak asasi manusia

D. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu lainnya

- Ilmu negara

Ilmu negara memberikan dasar-dasar teoritis kepada htn positif sedangkan htn merupakan kongkretisasi dari teori-teori ilmu negara. hal ini merupakan bekal untuk dapat berkecimpung langsung dengan hukum positif yang merupakan salah satu objek htn.

- Ilmu politik

Hubungan htn dengan ilmu politik pertama kali di kemukakan oleh J. Barent di dalam bukunya De Watenschap der politiek. hubungan ini diungkapkan dengan suatu perumpamaan : het vlees omhet geraamte van de staat. artinya bahwa htn sebagai kerangka manusia, sedangkan ilmu politik sebagai daging yang melekat di sekitarnya.

- Hukum administrasi negara

Hukum tata negara menentukan lembaga negara dan wewenangnya baik vertikal maupun horizontal sementara hukum administrasi negara mengatur penggunaan (operasional) wewenang oleh lembaga negara yang telah diberikan oleh hukum tata negara.

- Hukum internasional

Hukum internasional berkaitan dengan hubungan luar negeri suatu negara

dengan negara-negara lain. sedangkan htn mengatur hubungan negara dengan warga negaranya dan pihak-pihak lain di dalam wilayah negara. keduanya memperhatikan mengenai masalah pengaturan nilai-nilai dan proses hukum kekuasaan besar yang dimiliki oleh negara modern.

Judul resume : Sumber-sumber hukum tata negara

Nama : Sumarni

Nim : 10200120237

Pembahasan :

- Pengertian sumber hukum
 - Menurut Jimly assiddiqie
Sumber hukum adalah menunjuk kepada pengertian tempat dari mana asal-muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal.
 - Secara umum
Sumber hukum adalah dasar hukum, landasan hukum atau payung hukum. maksudnya yaitu legal basic atau legal ground, yaitu norma hukum yang di jadikan dasar dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum tersebut dianggap sah dan sesuai dengan hukum.
- Sumber hukum tata negara
 - secara umum yaitu
 - 1) Undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan tertulis baik uud maupun peraturan perundangan-undangan merupakan produk legislasi oleh lembaga yang mendapatkan delegasi kewenangan regulasi sehingga bentuknya bisa legislative acts seperti undang-undang maupun excutive acts seperti peraturan pemerintah.
 - 2) Yurisprudensi-putusan pengadilan
 - 3) Konvensi ketatanegaraan-kebiasaan
 - 4) Hukum internasional-traktat atau perjanjian
 - 5) Doktrin ilmu hukum tata negara-pendapat ilmuwan
- Sumber hukum tata negara di indonesia
 - Secara umum terbagi menjadi dua yaitu :
 1. Sumber hukum materil
Menurut bagir manan ialah dasar dan pandangan hidup bernegara serta kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah hukum tata negara.
Menurut jimly assiddiqie ialah pancasila di mana rumusan sila-sila pancasila merupakan falsafah hidup bernegara dan pandangan hidup bangsa, pancasila merupakan sumber hukum materil yang tidak hanya sebatas menjiwai, tetapi harus dilaksanakan dan tercermin dalam setiap peraturan hukum indonesia.
 2. Sumber hukum formil
Menurut dedi ismatullah dan beni ahmad saebani ialah patokan atau kaidah hukum yang formal yang menjadi penyebab hukum itu di rujuk oleh hukum-hukum formal di bawahnya.
Menurut ahmad ali ialah undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, doktrin dan hukum agama.
- Contoh sumber hukum tata negara di indonesia
 - a) Sumber hukum materil
 - 1) agama
 - 2) kesusilaan

- 3) kehendak tuhan
 - 4) akal budi
 - 5) hubungan sosial
- b) Sumber hukum formil
 - 1) undang-undang (statute)
 - 2) kebiasaan (custom)
 - 3) keputusan hakim
 - 4) traktat (treaty)
 - 5) doktrin (pendapat sarjana hukum)
- Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
 - 1) Undang-undang negara republik indonesia tahun 1945
Ditetapkan oleh MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DP.
 - 2) Ketetapan MPR
Ditetapkan oleh MPR.
 - 3) UU/PERPU
UU dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden.
PERPU ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
 - 4) Peraturan pemerintah
Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
 - 5) Peraturan presiden
Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah.
 - 6) Perda provinsi
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dengan persetujuan bersama gubernur.
 - 7) Perda kab/kota
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota.
 - 8) Peraturan lain
Peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, Badan/lembaga/komisi, DPRD, Gubernur, Bupati/walikota, Kepala desa.

Judul resume : Asas-asas hukum tata negara

Nama : Sumarni

Nim : 10200120237

Pembahasan :

- Pengertian asas hukum
 - **Satijpto rahardjo** asas hukum adalah unsur yang paling penting dan pokok dari sebuah peraturan hukum sehingga beliau mengartikan asas hukum sebagai “jantungnya” peraturan hukum ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.
 - **H.J. Homes**, asas hukum tidak boleh di anggap sebagai norma-norma hukum yang kongkret, tetapi perlu di pandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.
 - **Secara umum**, asas hukum adalah pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkret atau di luar dari peraturan hukum konkret.
- Fungsi asas hukum
 - Penjaga konsistensi maksudnya yaitu menjaga ketaatan atau konsistensi. asas hukum akan berfungsi untuk menjaga agar dalam proses pembentukan peraturan hukum maupun dalam penerapannya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
 - Mengatasi konflik maksudnya yaitu salah satu batu uji jika terdapat pertentangan antar peraturan hukum ataupun antar organ/lembaga negara.
- Macam-macam asas hukum tata negara indonesia
 - Asas pancasila sebagai salah satu asas hukum tata negara indonesia adalah seluruh penyelenggaraan negara harus sesuai dan tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai pancasila baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
 - Asas negara hukum ialah segala penyelenggaraan negara baik tindakan oleh aparatur negara maupun oleh warga negara harus berdasarkan dan tunduk pada hukum.
 - Asas negara kesatuan ialah seluruh sikap, tindakan, kebijakan dan perilaku dari seluruh elemen berbangsa harus sesuai dengan prinsip kesatuan dan persatuan.
 - Asas kedaulatan rakyat dan demokrasi ialah penyelenggaraan negara harus di dasarkan pada apa yang menjadi kehendak rakyat, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia.
 - Asas pemisahan kekuasaan dan check and balances maksudnya yaitu segala cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagai sesama lembaga negara yang sederajat dapat saling mengontrol, sehingga peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dapat di minimalisir.
- Macam-macam asas hukum dalam KUHPDT di indonesia
 - Asas kebebasan berkontrak
 - Asas konsensualisme
 - Asas kepercayaan
 - Asas kekuatan mengikat
 - Asas persamaan hukum
 - Asas keseimbangan
 - Asas kepastian hukum

- Asas moral
- Asas perlindungan
- Asas kepatutan
- Asas kepribadian
- Asas itikad baik
- Tujuan asas hukum
 - Menurut mochtar kusumaatmadja, tujuan asas hukum adalah terpeliharanya dan terjamin keteraturan (kepastian) dan ketertiban.

Judul resume : Sejarah ketatanegaraan indonesia

Nama : Sumarni

Nim : 10200120237

Pembahasan :

I. Sejarah ketatanegaraan indonesia

Sejarah ketatanegaraan indonesia dapat di telusuri antara lain berdasarkan perubahan konstitusi, bentuk negara, bentuk pemerintahan dan lainnya.

- Konstitusi adalah hukum dasar yang di jadikan acuan/pedoman dalam penyelenggaraan suatu negara. sebagai hukum dasar, konstitusi dapat berbentuk hukum dasar yang tertulis dan dapat pula tidak tertulis. indonesia menganut konstitusi tertulis yang di sebut dengan undang-undang dasar. sejarah ketatanegaraan indonesia telah beberapa lama mengalami pergantian di mulai dari UUD 1945, konstitusi ris, UUD sementara, dan akhirnya kembali ke UUD 1945. lalu kemudian mengalami perubahan pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002.

- UUD 1945

Disiapkan oleh suatu badan yang di bentuk dan di lantik oleh pemerintah balatentara jepang pada tanggal 28 mei 1945 dengan nama "Dokuritsu zyunbi tyoosakai" atau badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan indonesia (BPUPKI). dab BPUPKI juga yang menyetujui hasil kerja panitia kecil sebagai rancangan UUD pada tanggal 16 agustus tahun 1945 dan secara resmi di nyatakan berlaku sebagai UUD pada tanggal 18 agustus 1945.

- Konstitusi RIS

Dengan berdirinya ris wilayah republik indonesia masih tetap di akui dan di anggap sebagai negara bagian dari ris dan assaat sebagai pelaksana tugas presiden, sesuai ketentuan pasal 2 konstitusi ris di wilayahnya sesuai dengan persetujuan renvile.

- UUD sementara

Undang-undang dasar sementara republik indonesia atau di kenal dengan UUDS 1950. adalah konstitusi yang berlaku di negara republik indonesia sejak 17 agustus 1950 hingga di keluarkan dekret presiden 5 juli 1959. konstitusi ini di namakan sementara karena hanya bersifat sementara menunggu terpilihnya konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru.

- UUD 1945 (1959-sekarang)

Sejarah ketatanegaraan indonesia khususnya mengenai uud sudah beberapa kali mengalami perubahan dalam arti pembentukan, penyusunan, dan pergantian UUD dasar.

II. Berdasarkan perubahan bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pmerintahan.

- Perubahan bentuk negara

a. Negara kesatuan

- o hanya ada satu konstitusi
- o pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak sederajat
- o kekuasaan pemerintah dapat di laksanakan dengan dekonsentrasi dan desentralisasi

- b. Negara federal
 - o terdiri dari negara-negara bagian
 - o negara bagian memiliki konstitusi sendiri
 - o pemerintah federal dan pemerintah negara bagian sederajat
- Bentuk pemerintahan
 - i. Republik
 - kepala negara dipilih, bukan di tentukan berdasarkan garis keturunan (turun temurun)
 - ii. Monarki/kerajaan
 - jabatan kepala negara bersifat turun temurun
- Sistem pemerintahan
 - Presidensil :**
 - o menteri di angkat dan bertanggung jawab kepala presiden
 - o presiden tidak serta merta dapat diberhentikan oleh DPR
 - o kedudukan presiden dan DPR sederajat
 - o presiden juga sebagai kepala pemerintahan
 - o presiden di pilih secara langsung
 - Parleментар :**
 - o menteri bertanggung jawab kepada DPR
 - o kepala pemerintahan adlah perdana menteri
 - o perdana menteri dipilih oleh DPR
 - o perdana menteri sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh DPR
 - o sistem pemerintahan cenderung tidak stabil

Judul resume : Konstitusi sebagai objek kajian hukum tata negara

Nama : Sumarni

Nim : 10200120237

Pembahasan :

A. Istilah konstitusi

Terdapat beberapa istilah yang memiliki arti yang sama dengan konstitusi, seperti *constitutie* dan *grondwet* (belanda), *constitutionel* (prancis), *constitutio* (latin dan inggris), *fundamental laws* (amerika serikat), dan di indonesia di gunakan istilah undang-undang dasar yang merupakan terjemahan dari bahasa belanda *grondwet*.

B. Pengertian konstitusi

- C.F strong

Konstitusi adalah kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang di perintah (rakyat) dan hubungan di antara keduanya baik yang bentuknya terdokumentasi maupun tidak terdokumentasi.

- James bryce

Konstitusi adalah suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang di organisir dengan dan melalui hukum. hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah di akui dan hak-hak yang telah di tetapkan.

- Pengertian konstitusi dalam arti luas dan sempit

Konstitusi dalam artian sempit ialah konstitusi yang terdokumentasi/tertulis (ioi *constitunelle*) yang berisi ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan dasar atau hukum dasar (piagam, treaty, dan undang-undang dasar)

Konstitusi dalam artian luas ialah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan dasar atau hukum dasar (*droit constitunelle*) baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

C. Nilai konstitusi

- Nilai yang bersifat normatif ialah apabila konstitusi di terima, di akui dan di patuhi sebagaimana mestinya (*sollen*) baik oleh pemerintah maupun oleh rakyat (subjek hukum).
- Nilai yang bersifat nominal ialah apabila konstitusi tidak di jadikan sebagai sumber hukum atau pedoman, baik sebagian atau seluruhnya dalam proses penyelenggaraan negara.
- Nilai yang bersifat semantik ialah apabila konstitusi hanya di jadikan sebagai alat pembenaran atas segala kebijakan/tindakan penguasa tanpa di praktikkan sungguh-sungguh.

D. Sifat konstitusi

- Fleksibel/luwes
- Tertulis
- Tidak tertulis
- Rigid/kaku

E. Fungsi dan tujuan konstitusi

- Fungsi
 - o sebagai sumber hukum
 - o sebagai penentu, pembagi dan pembatas kekuasaan organ negara
 - o sebagai pemberi/penyalur pengalih kewenangan kepada organ negara

- o sebagai pengatur hubungan antar organ negara
- o sebagai pengatur hubungan antara organ negara dengan warga negara
- o sebagai symbol of unity, social control, social engineering dan sebagai identity of nation
- Tujuan
 - o Konstitusi bertujuan untuk menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat atau menjadi pedoman penyelenggaraan negara
 - o Konstitusi bertujuan untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah
 - o Konstitusi bertujuan untuk menjamin hak-hak rakyat

F. Muatan konstitusi secara umum

- o pembentukan, pembagian dan pemisahan kekuasaan
- o pemilihan umum
- o hak dan kewajiban warga negara, termasuk hak asasi manusia
- o kewenangan cabang-cabang kekuasaan (legislatif, eksekutif, yudikatif dan lembaga independen)
- o hubungan antara pemerintah pusat dan daerah
- o perubahan konstitusi

Judul resume : Organ dan fungsi kekuasaan negara

Nama : Sumarni

Nim : 10200120237

Pembahasan :

A. Pengertian organ dan fungsi

- Organ adalah bentuk dan wadahnya sedangkan fungsi adalah isi dari organ yang bergerak sesuai dengan maksud pembentukannya.

B. Fungsi kekuasaan

- John locke
 - o fungsi legislatif
 - o fungsi eksekutif
 - o fungsi federatif
- Montesquieu
 - o fungsi legislatif
 - o fungsi eksekutif
 - o fungsi yudikatif
- Van vollenhoven
 - o fungsi regeling (pengaturan)
 - o fungsi bestuur (pemerintahan)
 - o rechtspraak (peradilan)
 - o politie (fungsi untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat)

C. Marshall membagi 5 ciri-ciri pemisahan kekuasaan

- Differentiation
Pembedaan secara tegas antara fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif
- Legal incompatibility of office holding
Tidak boleh ada rangkap jabatan antara pejabat legislatif, eksekutif dan yudikatif
- Isolation, immunity, independence
Setiap organ tidak boleh saling mencampuri urusan organ lain untuk menjamin indenpendensi masing-masing organ
- Checks and balances
Saling mengimbangi dan saling mengendalikan antar cabang kekuasaan
- Coordinate status and lack of accountability
Kedudukan lembaga/organ negara sederajat, hubungan yang terjalin bukan hubungan yang bersifat subordinatif antara satu dengan lainnya.

D. Fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif

- Legislatif
Lembaga legislatif berfungsi sebagai pembuat undang-undang, peraturan dan kebijakan
- Eksekutif
Lembaga eksekutif berfungsi sebagai pelaksana undang-undang
- Yudikatif
Lembaga yudikatif berfungsi sebagai pengawas jalannya pemerintahan pada suatu negara

E. Contoh dan pengertian lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif

- Lembaga legislatif ialah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk merumuskan dan membuat peraturan, kebijakan, dan undang-undang suatu negara.
 - o Contohnya yaitu :
 - DPR
 - DPD
 - MPR
- Lembaga eksekutif adalah pelaksana dari kebijakan, undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif.
 - o Contohnya yaitu :
 - Presiden
 - Wakil presiden
 - Menteri
- Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang bertugas melakukan pengawasan, pengawalan, dan memantau proses pelaksanaan UUD dan pengawasan pelaksanaan hukum di suatu negara.
 - o Contohnya yaitu :
 - MK (mahkamah konstitusi)
 - MA (mahkamah agung)
 - KY (komisi yudisial)

Sekian, Terima kasih!